



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bangka Pos

Babel Pos

Babel News

Radar Bangka

Rakyat Pos

Lainnya: _____

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

2
0
1
9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Pusat Transfer Rp 6,7 T ke Babel



BANGKA POS/DOK.

Supendi

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Rata-rata hampir setiap tahun pemerintah pusat mentransfer uang kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai desentralisasi fiskal sebesar sekitar Rp 9,7 triliun. Adapun dana hasil pajak yang berhasil dikumpulkan dari Negeri Serumpun Sebalai sekitar Rp 2,5 triliun per tahun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Babel, Supendi, usai menghadiri penandatanganan kerja sama penerbitan kartu kredit pemerintah antara kuasa pengguna anggaran satuan kerja (KPA satker) dengan pihak Bank Mandiri di aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang, Rabu (24/4).

"Untuk tahun 2019 ini, total dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Rp 6,7 triliun lebih," kata Supendi.

Pusat

Sambungan Halaman 13

Ia menyebutkan, uang tersebut terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK nonfisik, dana insentif

daerah, serta dana desa. "Khusus untuk DAK fisik dan dana desa tetap melalui KPPN, dan KPPN juga menyalurkan kepada satker-satker dengan total dana antara Rp 2,7 triliun sampai Rp 3 triliun," tuturnya.

KPPN Pangkalpinang, kata Supendi, mengelola

DAK fisik dan dana desa untuk Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, dan 156 satker.

Sementara, KPPN Tanjungpandan melayani Kabupaten Belitung, Belitung Timur, dan 32 satker. (edw)